

SKRIPSI

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA *CLASS ACTION*

DALAM PRAKTIK PERADILAN PERDATA



Oleh :

HAIFA KHAIRUNNISZA

B 111 10 404

BAGIAN HUKUM ACARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2014

HALAMAN JUDUL

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA *CLASS ACTION*
DALAM PRAKTIK PERADILAN PERDATA

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Program
Sarjana pada Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum

OLEH :

HAIFA KHAIRUNNISZA

B 111 10 404

BAGIAN HUKUM ACARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS TENTANG PUTUSAN PERKARA *CLASS ACTION* DALAM PRAKTIK PERADILAN PERDATA

Disusun dan diajukan oleh

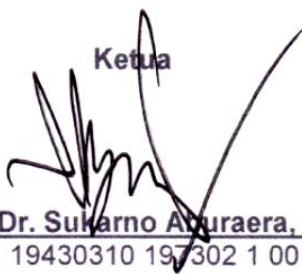
HAIFA KHAIRUNNISZA

B 111 10 404

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 28 Januari 2014
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

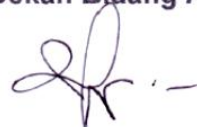
Ketua


Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H.
NIP. 19430310 197302 1 001

Sekretaris


Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**


Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan Bahwa Proposal Mahasiswa :

Nama : HAIFA KHAIRUNNISZA

Nomor Pokok : B 111 10 404

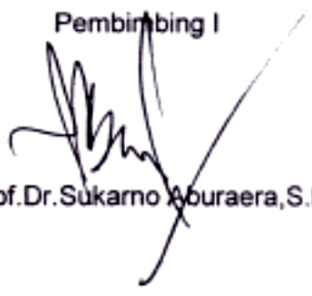
Bagian : Hukum Acara

Judul Skripsi : Analisis Terhadap Putusan Perkara *Class Action* Dalam
Praktik Peradilan Perdata

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 15 Januari 2014

Pembimbing I


Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H.

Pembimbing II


Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :


Nama : **HAIFA KHAIRUNNISA**
No. Pokok : B111 10 404
B a g i a n : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Perkara Class Action dalam Praktik Peradilan Perdata

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2014

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik.



✓ Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. 
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

HAIFA KHAIRUNNISZA (B 111 10 404), Analisis Tentang Putusan Perkara *Class Action* dalam Praktik Peradilan Perdata, dibimbing oleh Bapak Soekarno Aburaera sebagai Pembimbing I dan Bapak Hasbir Paserangi sebagai Pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Perma No. 1 Tahun 2002 dalam praktik peradilan perdata dan untuk mengetahui apa saja indikator pembedaan jenis kerugian yang harus dipenuhi dalam gugatan *class action*, adapun masalah yang dibahas adalah bagaimana penerapan Perma No. 1 Tahun 2002 dalam praktik peradilan perdata dan bagaimana indikator pembedaan jenis kerugian yang harus dipenuhi dalam gugatan *class action*

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan sejumlah hakim serta para ahli, selain itu penelitian ini dilakukan melalui studi keperpustakaan dengan membaca ataupun menganalisa bahan-bahan yang tertulis yang ada kaitannya dengan judul.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa (1) Belum terdapat cara merealisasikan atau membagi ganti kerugian kepada anggota-anggota kelompok yang berjumlah banyak, yang berada di wilayah hukum pengadilan yang berbeda, jika gugatan suatu kelompok dikabulkan. Selain itu belum terdapat cara agar suatu kelompok yang berada di wilayah hukum pengadilan yang berbeda dapat membuktikan keikutsertaannya dalam suatu kelompok yang mengajukan gugatan *class action* agar berhak memperoleh ganti rugi. (2) bahwa perihal pembedaan jenis kerugian dalam perkara gugatan *class action* penulis menarik kesimpulan bahwa kerugian dibedakan berdasarkan jenis anggota kelompok yang tergabung dalam gugatan *class action*. Setiap kelompok yang berbeda-beda tentu memiliki kerugian yang berbeda berdasarkan kepentingan kelompoknya. Kerugian tersebut kemudian dirangkum dalam kerugian materil dan immateril.

Disaranka agar revisi terhadap PERMA No.1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok dengan memasukkan pembahasan mengenai mekanisme pendistribusian ganti rugi ke setiap anggota kelompok secara efektif dan efisien, termasuk untuk kelompok yang berada di luar wilayah hukum pengadilan yang menangani perkara tersebut. Kemudian harus ditambahkan pembahasan mengenai mekanisme yang lebih adil dalam hal keikutsertaan seseorang/kelompok sebagai anggota kelompok dalam gugatan *class action*. Terakhir perlu adanya batasan minimal yang jelas mengenai jumlah kelompok yang diwakili dalam suatu gugatan *class action*.

ABSTRACT

HAIFA KHAIRUNNISZA (B 111 10 404) , Decision Analysis About The Class Action in Practice, Civil justice, guided by Mr. Soekarno Aburaera as Mentor I and Mr. Hasbir Paserangi as Scan.

This study aimed to determine the application of Perma No . 1 in 2002 in civil justice practices and to find out what type of loss discrimination indicators that must be met in a class-action lawsuit , as for the problem that is discussed is how the application of Perma No . 1 in 2002 in civil justice practices and how indicators classification of loss that must be met in a class-action lawsuit

The study was done using data collection techniques through interviews with a number of judges and experts, as well as the research was done through study or analyze the librarian to read the written materials that are associated with the title . From the results of the study concluded that (1) Currently there are alternate ways of realizing or share losses to members of many groups , which are in a different jurisdiction of the courts , if the claim of a group granted. In addition there is no way that a group which is different from the jurisdiction of the courts to prove its participation in a group that filed a class action lawsuit in order to be eligible for compensation. (2) that the description of the classification of losses in the class-action lawsuit authors conclude that losses are distinguished on the basis of group members joined in a class action lawsuit . Each different group would have different losses on the importance of his group . These losses are then summarized in a loss materil and immateril .

Recommended that the revision of the perma No.1 of 2002 on Class Action Representation Group to include discussion of the mechanism of distribution of compensation to each member of the group effectively and efficiently , including to groups that are outside the jurisdiction of the courts to deal with the matter. Then be added to the discussion of the mechanism that is more just in case someone opt / cluster as a member of a group in the class-action lawsuit . Should last at least clear of the restrictions on the number of groups to be represented in a class-action lawsuit .

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan penguasa dan pemilik semesta alam yang telah memberi banyak nikmat terutama nikmat umur dan nikmat kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “*Analisis Terhadap Putusan Perkara Class Action dalam Praktik Peradilan Perdata*” sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu Universitas Hasanuddin Makassar. Salam dan Shalawat semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta ayahanda **Ir. Syarifuddin Madjid** dan ibunda **Iva Aryani, S.H.**, dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan kasih sayang membesarkan dan memberikan semangat kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan. Pencapaian penulis tidak lepas dari keberadaan kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan Doa dan dukungannya.

Seluruh kegiatan penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu, maka izinkanlah penulis untuk menghaturkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penelitian hingga penulisan skripsi ini:

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini menemui banyak kendala dan hambatan, untuk itu ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada **Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H.** selaku Pembimbing I (satu) dan **Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II (dua) yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama penulisan Skripsi. Dan terima kasih kepada para pihak yang ikut membantu dan terus memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

1. Terima kasih kepada **Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H., Dr. Mustafa Bola, S.H., M.H., Ratnawati S.H., M.H.**, selaku Dewan penguji yang telah memberikan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Terima kasih kepada bapak **Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.** Selaku Dewan Penguji yang juga merupakan dosen pembimbing akademik penulis selama berkuliah di Fakultas hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan berbagai arahan, support, motivasi, dan berbagai bantuan materi dan non materi lainnya dalam menyelesaikan studi.
3. Terima kasih kepada **Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM** selaku Dekan Fakultas Hukum Unhas, beserta para Wakil Dekan **Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. Romi**

Librayanto, S.H., M.H atas berbagai bantuan yang diberikan kepada Penulis, baik bantuan untuk menunjang berbagai kegiatan individual maupun yang dilaksanakan oleh Penulis bersama organisasi lain di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

4. Terima kasih kepada Ketua Bagian Hukum Acara **Prof. Dr. Syukri Akub, S.H., M.Si** dan Sekretaris Bagian **Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H** dan Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar khususnya **Dr. Muh. Hasrul ,S.H., M.H.**, yang telah menuangkan ilmu kepada Penulis sejak kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar sampai sekarang.
5. Terima kasih Kepada Seluruh staff akademik dan perpustakaan FH-UH khususnya kepada kak Tri, Bu Sri, Pak Ramalan dan Pak Bunga, atas segala bantuannya selama Penulis berkuliah di FH-UH.
6. Terima kasih kepada nara sumber Bapak **Ramli Djalil, S.H.,M.H.**, **Ibrahim Paleno S.H, M.H.**, **Yoga D.A Nugroho S.H., M.H.**, ibu **Fifiyanti, S.H., M.H.**, serta kepada seluruh pihak yang telah bersedia membantu penulis dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini.
7. Terima kasih kepada keluarga besar penulis , **Baba Lusi Nurwati, Reza Pahlevi, Rifkah Aulia Inayah, Irmawati Yasin, Evi Yanti, S.E., Eva Arifah, Ivan Fauzi, Erlin Fahmi, Tante Amalia Malik S.H.**,

sebagai keluarga yang memberikan dorongan, semangat, motivasi, dan segala bentuk bantuan dalam menyelesaikan studi ini.

8. Kepada sahabat-saudara terbaik, **VIGLEA, Maulida Widya Utari Parawansa, Andi Astri Ardinda, Khaerun Nizaa, Nurul Suci Ramadhani, Namira Arfa, Irma Arfyanti Akob, Widya Ramlah, Syarifah Annisa, Nurul Hadiani Salam, dan Rivia Widhowati Mayangsari** yang selalu ada di setiap waktu penulis membutuhkan, bagaimanapun keadaannya. Terima kasih atas berbagi pengalamannya selama ini dan yang selalu setia menemani dan memberikan bantuan serta motivasi kepada penulis.
9. Kepada sahabat seperjuangan, **GENG** khususnya **Nadya Sestiasah** teman seperjuangan dalam berbagai hal, **Pia Ardyagarini** yang sangat lincah dan selalu bersedia untuk direpotkan, serta **Basri, Nina Kartikasari, Andi Juzailah, Dian Fiqhy, Trie Ayu Sudarti, Dea Adilah Yugo, Yuristita, Eka Novianti, Dian Asril, Rifka, Anita Kumala, Dhinta Wulandary, Riska Reskika, dan Tiwi**. Selamat berjuang dan terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya selama ini, mulai dari awal perkuliahan hingga sekarang.
10. Terima kepada kakanda **Mistriani A. Muin S.H.**, yang paling baik hati yang tidak bisa bilang tidak, tapi suka ngambek. Terima kasih atas kebaikan, dukungan serta bantuan-bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini menyusun tugas dan skripsi ini.

11. Terima kasih juga saya ucapkan kepada kakanda **Zainul Alim** yang sangat memberikan banyak bantuan, arahan serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada Keluarga Besar **HLSC (Hasanuddin Law Study Center)** Khususnya kepada **Muhammad Furqaan** yang membantu segala hal, **Emil Ilham, Arfhani Ichsan, Achsan, Ricky Tangkau** yang memberikan banyak dukungan kepada penulis, dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada **Muh. Triocsa, Firmansyah, Septian Eka Sakti, Febry Nur Naim naim, Asrowinsyah, Muh.Dzulfan, Ian** dan **Suneza lainnya** yang tidak henti-hentinya memberi bantuan, Terima kasih atas dukungan dan kesediaannya untuk selalu membantu.
14. Kepada **Adini Thahira dan Adhenia** Terima kasih atas segala dukungan dan telah banyak membantu penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum.
15. Terima kasih kepada **kak Astari Rasyida, Mutia Nadira, Lala Nadra** atas bantuan dan dukungannya selama ini.
16. Kepada Keluarga Besar **Fakultas Hukum Unhas 2010, Fadel, Abdi, Agung, Aca, Buja, Trie, Dila Wadjedah, Reyzah, Adiyat, Riza, Avil, Surya, Anto, Azwad, Fakhry**, teman-teman angkatan **Legitimasi**

2010 lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas dukungannya dan semoga sukses kedepannya.

17. Kepada Teman **KKN Internasional Kedah, Malaysia Utara Jiji, Yuyun, Kak Icha, dan Yunita Anshari**. Terima kasih atas segala bantuan pengalaman baru yang diberikan selama KKN.

18. Serta **Hj. Sunny dan Cece** sebagai pemilik saham terbesar di Sunny Cafe yang sangat secara tidak langsung telah banyak membantu penulis selagi krisis keuangan.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya kepada rekan-rekan yang telah turut memberikan sumbangsinya dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalam.....

Makassar, Januari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata	9
1. Pengertian Peradilan Perdata	9
2. Regulasi Peradilan Perdata	12
3. Asas-Asas Peradilan Perdata	12
4. Ruang Lingkup Peradilan Perdata	19
5. Tahapan-tahapan Peradilan Perdata	23
B. Gugatan	24
1. Definisi Gugatan	24
2. Bentuk–Bentuk Gugatan.....	25
3. Jenis-Jenis Gugatan	28
C. Gugatan Kelompok (<i>Class Action</i>) dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia.....	30

1. Sejarah Gugatan Kelompok (<i>Class Action</i>) dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia	30
2. Pengertian Gugatan Kelompok	33
D. Putusan Pengadilan	35
1. Asas-Asas Putusan	36
2. Jenis-Jenis Putusan	38
3. Formulasi Putusan	41
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Tipe Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Jenis dan Sumber Data	47
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Analisis Data	48
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	49
A. Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok (<i>Class Action</i>) dalam Praktik Peradilan Perdata	49
1. Syarat-syarat Gugatan Perwakilan Kelompok (<i>Class Action</i>)	53
2. Indikator Pembeda Jenis Kerugian	68
3. Manfaat Gugatan Perwakilan Kelompok (<i>Class Action</i>)	70
B. Kekurangan PERMA terhadap Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (<i>Class Action</i>)	77
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala aspek kehidupan manusia dalam masyarakat baik dari hal yang sekecil-kecilnya sampai pada hal yang sebesar-besarnya yang pada kenyataannya selalu diatur oleh hukum, antara lain salah satunya ialah oleh hukum perdata. Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian sebagai negara hukum, Indonesia harus membuktikan dirinya telah menerapkan secara nyata dari prinsip-prinsip negara hukum, yaitu kepastian hukum, menjamin/melindungi hak asasi penduduk, dan peradilan bebas karena manusia mempunyai kepentingan yaitu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan dapat dipenuhi sesuai yang diharapkan.

Sebagaimana diketahui, masyarakat merupakan kumpulan manusia yang hidup bersama untuk waktu relatif lama. Mereka memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan yang terikat pada satu sistem kehidupan bersama dimana di dalamnya terdapat berbagai kaidah yang bertujuan untuk mengatur bagaimana warganya bertingkah laku.¹ Setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum

¹Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, Hal. 238

dan ia pun berhak untuk membela haknya apabila ia merasa dirugikan oleh pihak lain.

Keinginan dari masyarakat dan para pencari keadilan menuntut agar penyelesaian perkara melalui pengadilan berjalan sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Seiring dengan pesatnya laju pembangunan dewasa ini dengan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, maka tuntutan penyelesaian perkara melalui proses berperkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan tersebut sangatlah dibutuhkan. Tujuan dari kedua belah pihak yang berperkara di pengadilan negeri adalah untuk mendapatkan kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), yaitu putusan yang tidak mungkin dilawan dengan upaya hukum verzet, banding, kasasi². Tujuan lainnya ialah untuk menyelesaikan perkara akibat telah terjadinya perbenturan kepentingan keperdataan antara individu. Hal ini menjadi dasar pemikiran diadakannya aturan gugatan perdata.

Secara umum model gugatan perdata ada dua macam yaitu gugatan yang dilakukan di luar pengadilan dikenal dengan sebutan nonlitigasi, sedangkan gugatan yang dilakukan melalui peradilan disebut litigasi. Oleh karena itu, gugatan perdata bisa menjadi dasar diselenggarakannya peradilan perdata. Gugatan perdata atas pelanggaran hubungan perdata dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

²Ridwan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 127.

1. Oleh orang yang bersangkutan atau ahli warisnya.
2. Sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama (*class action*).³

Lembaga *class action* dikenal di banyak Negara yang menganut sistem hukum *common law*. Prosedur gugatan perwakilan kelompok atau *class action* pertama kali dikenal di Inggris pada awal abad ke-18. “*The Pill of Peace*”⁴ yang memungkinkan banyak penggugat atau banyak tergugat untuk menyelesaikan perkara dengan masalah yang sama dalam satu gugatan saja. Sebelum 1873 penerapan *class action* ini hanya diperkenankan pada *Court of Chancery*, dengan alasan bahwa jika dalam suatu perkara penggugatnya begitu banyak tidaklah mungkin keseluruhannya diwajibkan hadir secara fisik ke persidangan, sehingga pengadilan memperbolehkan perwakilan penggugat untuk mewakili perkara tersebut atas nama penggugat lain, baik yang hadir maupun tidak hadir.⁵

Berbeda dengan Inggris, Amerika Serikat *Equity Rule 48* merupakan kodifikasi pertama peraturan *class action* yang memungkinkan digunakan acara gugatan perwakilan di Amerika Serikat pada 1842, dan diterapkan hanya terhadap perkara tertentu, ialah perkara yang

³Gugatan Class Action, <http://www.inclaw-hukum.com/index.php/hukum-perdata/hukum-acara-perdata/139-gugatan-class-action>, Dikutip pada tanggal 29/9/2013

⁴The Bill of Peace adalah suatu praktek pengadilan Inggris yang digunakan di abad ke-17 & 18 untuk sengketa hukum yang melibatkan beberapa pihak dari berbagai aspek umum.

⁵Susanti Adi Nugroho, *Class Action & Perbandingan dengan Negara Lainnya*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal.8

melibatkan banyak orang, dapat dilakukan melalui perwakilan dan tanpa dihadiri para pihak secara individu. Penggunaan acara perwakilan acara ini seharusnya tidak akan merugikan hak-hak dan tuntutan pihak penggugat yang tidak hadir, tetapi *Equity Rule 48* maupun dalam putusan-putusan pengadilan pada era tersebut, ternyata “putusan pengadilan dalam perkara gugatan perwakilan kelompok tidak mengikat pihak-pihak yang tidak hadir” (*a class action judgment had no binding effect upon absent parties*).⁶

Di India pengakuan terhadap prosedur class action mulai dikenal pada 1908 dan diatur dalam *Rule VIII of Order 1 of Civil Procedure, 1908*, sebagaimana diubah dan sempurnakan pada 1976. Penerapan class action di India sebagaimana di Amerika Serikat sulit diterapkan karena pada hakikatnya pengaturan biaya perkara secara kelompok (*contingency fee*) di India tidak diperbolehkan.⁷

Berbeda dengan Australia meskipun gugatan *class action* atau *representative proceeding* sudah diakui bertahun-tahun di Amerika dan Kanada, tetapi di Australia prosedur gugatan perwakilan ini baru disusulkan di Pengadilan Federal pada 1988 dan baru dilaksanakan pada 1991, dengan mengamandemen *Federal Court of Australia Act 1976*. Meskipun pada awal pelaksanaannya tidak banyak perkara yang diajukan dengan prosedur perwakilan ini, tetapi secara bertahap berkembang

⁶ibid, Hal. 9

⁷ibid, Hal. 19

cepat, makin banyak gugatan yang diajukan dengan mekanis gugatan kelompok ini.⁸

Di Kanada *class action* mulai dikenal dan direkomendasikan dalam *Report on Class Action Ontario Law Reform Commission (OLRC) 1982*. Dalam rangka mewujudkan prosedur *class action* yang seragam untuk seluruh Negara bagian/provinsi di Kanada, *the Uniform Law Conference of Canada* telah berhasil membuat *Class Proceeding Act* pada 1996 yang diharapkan dapat diberlakukan di seluruh provinsi di Kanada. Meskipun tampaknya masih banyak hakim yang tidak suka dengan *class action*, tetapi secara keseluruhan badan peradilan di Kanada telah menerima bahwa *class action* memiliki peran yang penting dan berharga dalam memberikan akses bagi keadilan bagi banyak orang yang tidak mampu dari pada melakukan litigasi secara individu. Telah banyak usulan-usulan untuk memperluas cakupan *class action*, dengan memperoleh penerapan *class action* di pengadilan Federal Kanada. .⁹

Gugatan kelompok (*class action*) merupakan salah satu prosedur dalam gugatan perdata yang menyangkut hak sejumlah besar orang, namun diajukan oleh wakil kelompok yang terdiri dari sejumlah kecil orang yang mewakili kepentingan diri sendiri atau diri-diri mereka sendiri dan kelompok yang diwakili. Walaupun gugatan *class action* sudah dikenal pertama kali pada abad ke-18 di Inggris, kemudian meluas penerapannya

⁸ Ibid, Hal, 20

⁹Ibid, Hal. 25

pada abad ke-19 di negara-negara lainnya seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan beberapa negara lainnya yang pada umumnya menganut sistem hukum *common law*, namun di Indonesia sendiri konsep ini masih terbilang baru. Pada prinsipnya gugatan *class action* merupakan suatu cara untuk memudahkan pencari keadilan untuk mendapatkan pemulihan hak hukum yang dilanggar melalui jalur keperdataan. Namun, sangatlah tidak praktis jika kasus yang menimbulkan kerugian terhadap banyak orang, memiliki fakta atau dasar hukum, kerugian, dan tergugat yang sama, diajukan gugatan secara sendiri-sendiri, hal ini akan menjadi sesuatu yang sangat tidak efektif bagi pihak penggugat, tergugat, dan pengadilan sendiri. Gugatan *class action* ini merupakan mekanisme gugatan yang lebih ekonomis dan efisien, sebab mencegah terjadinya pengulangan proses perkara.

Hukum positif Indonesia telah mengatur gugatan *class action* dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Peraturan ini lahir sebab di dalam *Het Herziene Indonesisch Regelement* (HIR) dan *Regelement op de Burgelijk Rechtsvordering* (RBg) tidak dikenal istilah gugatan *class action*.

Adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok tidak serta-merta memberikan kepastian hukum dari gugatan kelompok. Dari berbagai kasus yang ada, sangat banyak gugatan *class action* yang ditolak oleh hakim. Alasan penolakan tersebut sangat

beragam, mulai dari tidak jelasnya definisi kelompok yang diwakili oleh kelompok yang mewakili, hingga sulitnya menentukan kesamaan dasar hukum terkait jenis kerugian yang dialami oleh kelompok tersebut.

Berpijak pada uraian diatas maka penulis mencoba mengkaji putusan hakim dalam perkara yang ada kaitanya dengan gugatan kelompok (*class action*). Oleh karena itu penulis merumuskan masalah secara konkrit agar pembahasannya terarah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan PERMA No.1 Tahun 2002 dalam praktik peradilan perdata ?
2. Bagaimana indikator pembedaan jenis kerugian yang harus dipenuhi dalam gugatan *Class Action* ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan PERMA No.1 Tahun 2002 dalam praktik peradilan perdata.

2. Untuk mengetahui apa saja indikator pembedaan jenis kerugian yang harus dipenuhi dalam gugatan *Class Action*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan memberikan masukan dalam praktik peradilan perdata di Indonesia khususnya tentang gugatan kelompok (*Class Action*) dalam hukum acara perdata Indonesia.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi solusi bagi para penggugat dan para penegak hukum mengenai penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 mengenai indikator pembedaan jenis kerugian dalam gugatan *class action*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata

1. Pengertian Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata

Hukum Acara atau Hukum Formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum material melalui suatu proses dengan berpedomankan kepada peraturan yang di cantumkan dalam hukum acara. Artinya hukum acara itu berfungsi kalau ada masalah yang dihadapi individu-individu Masalah itu perlu diselesaikan secara adil untuk memperoleh kebenaran. Tugas hukum acara menjamin ditaatinya norma-norma hukum material oleh setiap individu. Dengan perkataan lain, hukum acara hanya dijalankan dalam keadaan istimewa, yaitu dalam hal hukum material atau kewenangan yang oleh hukum material diberikan kepada yang berhak dan perlu dipertahankan. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum acara itu sebagai alat penegak dari aturan hukum material yang tidak membebankan kewajiban sosial dalam kehidupan manusia.¹⁰

Dalam sistem peradilan umum di Indonesia, dikenal adanya dua jenis hukum acara yang berlaku, yaitu Hukum Acara Pidana dan

¹⁰ R. Abdoel Djamali, S.H., Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, 2010, Hal. 193

Hukum Acara Perdata. Dimana hukum acara pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, sedangkan hukum acara perdata lebih dititikberatkan pada perlindungan kepentingan individu.

Hukum acara perdata yang disebut juga hukum perdata formal mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum perdata material. Fungsinya menyelesaikan masalah dalam mempertahankan kebenaran hak individu. Perkara perdata yang di ajukan oleh individu untuk memperoleh kebenaran dan keadilan wajib diselesaikan oleh hakim dengan kewajaran sebagai tugasnya.¹¹

Pendefinisian Hukum Acara Perdata sendiri oleh para ahli yang satu sama lainnya berbeda-beda namun pada prinsipnya mengandung tujuan yang sama.

1. Menurut bapak R. Wirjono Prodjodikoro, “dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata di Indonesia” menyatakan:
“Hukum Acara Perdata adalah rangkaian Peraturan yang memuat cara bagi mana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan Hukum Perdata.”

¹¹Ibid, Hal. 197

2. Menurut bapak Sudikno Mertokusumo, dalam karyanya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia menyatakan”, bahwa:

“Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagai mana caranya menjamin ditaatinya Hukum Perdata Materiil dengan perantaraan hakim.”

3. Menurut bapak Supomo, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri”, menjelaskan :

“Dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (Burgerlijke rechts orde), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.”

4. Menurut bapak H. Riduan Syahrani, dalam bukunya yang berjudul “Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata” mengatakan :

“Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagai mana caranya menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan.”¹²

¹² Law File, Pengertian Hukum Acara Perdata
<http://lawfile.blogspot.com/2011/05/pengertian-hukum-acara-perdata.html>, dikunjungi
Selasa tanggal 1/10/1013

2. Regulasi Peradilan Perdata

Hukum Perdata (Materiil) yang akan ditegakan melalui proses penyelesaian perkara perdatanya dengan menggunakan Hukum Acara Perdata (Hukum Perdata Formil) meliputi diantaranya:

- a) Hukum Perdata (Materiil) yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan:

Burgerlijk Wetbook (BW),

Wetboek van Koophandel (WVK),

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA),

Undang - Undang Perkawinan,

dan sebagainya.

- b) Hukum Perdata (Materiil) yang tidak tertulis berupa Hukum Adat yang hidup dimasyarakat.

3. Asas-asas Peradilan Perdata

Asas-asas Hukum Acara perdata adalah dasar-dasar filosofis yang menjadi dasar norma hukum yang mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis yang menjadi jembatan antara peraturan-peraturan hukum dan cita-cita sosial serta pandangan etis masyarakat.

1) Hakim Bersifat Menunggu

Asas dari hukum acara perdata pada umumnya ialah bahwa pelaksanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya "*index ne procedat ex officio*" (lihat pasal 118 HIR, 142 Rgb.). Hanya yang menyelenggarakan proses adalah negara. Akan tetapi sekali perkara diajukan kepadanya, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (pasal 10 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009).

2) Hakim Pasif

Hakim didalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan (Pasal 4 ayat (2) UU No.48 tahun 2009). Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan

oleh para pihak (*secundum allegata iudicare*). Hanya peristiwa yang disengketakan sajalah yang harus dibuktikan. Hakim terikat pada peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukan oleh para pihak. Para pihaklah yang diwajibkan untuk membuktikan dan bukan hakim. Asas ini disebut *verhandlungsmaxime*. Jadi pengertian pasif ini yaitu bahwa hakim tidak menentukan luas dari pada pokok sengketa. Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya. Akan tetapi itu semuanya tidak berarti bahwa hakim tidak aktif sama sekali. Selaku pimpinan sidang harus aktif memimpin dan memeriksa perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekedar alat dari pada para pihak, dan haruslah berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan.

3) Sifatnya Terbuka

Persidangan Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan dari pada asas ini tidak lain untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat. Asas ini dapat

kita jumpai pada Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 :
“Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain”. Secara formil asas ini membuka kesempatan untuk “social kontrol”. Asas terbukanya persidangan tidak mempunyai arti bagi acara yang berlangsung secara tertutup. Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang atau apabila berdasarkan alasan-alasan yang penting yang dimuat di dalam nerita acara yang diperintahkan oleh hakim, maka persidangan dia lakukan dengan pintu tertutup.

4) Mendengar Kedua Belah Pihak (penggugat dan tergugat melalui surat-surat)

Didalamnya hukum acara perdata kedua belah pihak diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, seperti yang dimuat dalam pasal 4 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 mengandung arti bahwa didalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus di beri kesempatan untuk memberi pendapatnya. Asas kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas “*audi et alteram partem*” atau “*eines mannes redeist keines mannes rede, man soll sie horen alle*

beide”. Bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak di beri kesempatan untuk meneluarkan pendapatanya

5) Putusan Harus Disertai Alasan-alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (pasal 184 ayat (1), 319 HIR, 618 Rgb.). Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hakim dari pada putusnya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan yang mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.

6) Beracara Dikenakan Biaya

Untuk berperkara pada dasarnya dikenakan biaya (pasal pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009, 121 ayat 4, 182,183 HIR, 145 ayat 4, 192-194 RGB.). Biaya perkara ini meliputi biaya kepanitraan dan biaya panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Disamping itu apabila diminta bantuan seorang pengacara, maka harus pula dikeluarkan biaya. Namun bagi yang tidak mampu untuk membayar

biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*pro deo*) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi (Pasal 23 HIR, 273 RGB.).

7) Tidak Ada Keharusan Mewakilkkan

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan perkara orang lain, sehingga pemeriksaan terjadi secara langsung terhadap pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi para pihak dapat dibantu atau di wakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya. Dengan demikian hakim tetap wajib memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasa. Wewenang untuk mengajukan gugatan dengan lisan tidak berlaku bagi kuasa.

Dengan memeriksa para pihak yang berkepentingan secara langsung hakim dapat mengetahui lebih jelas persoalannya. HIR menentukan, bahwa para pihak dapat dibantu atau diwakili, akan tetapi tidak ada ketentuan bahwa seorang pembantu atau diwakil harus seorang ahli atau sarjana hukum. Pada hakikatnya tujuan dari pada perwakilan wajib oleh sarjana hukum (*verplichte procureurstelling*) ini tidak lain untuk lebih menjamin pemeriksaan yang objektif,

melancarkan jalanya peradilan dan memperoleh putusan yang adil.

Adapun mengenai terjadinya perwakilan, antara lain:

- a) Ketentuan undang-undang, misalnya untuk anak dibawah umur oleh orangtua atau wali, sakit ingatan oleh pengampunya.
 - b) Perjanjian kuasa khusus, untuk perwakilan yang dilakukan oleh pengacara atau penasehat hukum.
 - c) Tanpa surat kuasa khusus, untuk acara gugatan perwakilan kelompok oleh satu atau beberapa orang dari kelompoknya (Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok).
- 8) Peradilan Dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009)
- Maksudnya adalah hakim harus selalu insyaf karena sumpah jabatannya, ia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, diri sendiri dan kepada masyarakat, tetapi bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap putusan pengadilan harus mencantumkan klausa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” agar putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu

kekuatan untuk melaksanakan putusan secara paksa, apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela.

- 9) Peradilan Dilakukan dengan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Pasal 2 ayat (4) UU No.48 tahun 2009)

Sederhana maksudnya acaranya jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas dalam beracara maka semakin baik. Sebaliknya terlalu banyak formalitas atau peraturan akan sulit dipahami dan akan menimbulkan beraneka ragam penafsiran sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum. Cepat menunjuk jalannya peradilan yang cepat dan proses penyelesaiannya tidak berlarut-larut yang terkadang harus dilanjutkan oleh ahli warisnya. Biaya ringan maksudnya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Biaya perkara yang tinggi membuat orang enggan beracara di pengadilan.¹³

4. Ruang Lingkup Peradilan Perdata

Substansi yang diatur dalam hukum perdata, yaitu : (1) dalam hubungan keluarga (2) dalam pergaulan masyarakat. Dalam hubungan keluarga, akan timbul hukum tentang orang (badan pribadi) dan hukum keluarga, sedangkan dalam pergaulan

¹³Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 17

masyarakat akan menimbulkan hukum harta kekayaan, hukum perikatan dan hukum waris.

a) Hukum Perorangan/Hukum Pribadi:

Merupakan keseluruhan ketentuan norma hukum mengenai subyek hukum atau orang pribadi. Hukum Perorangan mengatur orang sebagai subyek hukum, siapa yang merupakan subyek hukum, kecakapan untuk bertindak dalam lalu lintas hukum, catatan sipil, ketidak hadirannya, nama dan tempat tinggal orang/pribadi (subyek hukum) dll. Hukum Perorangan memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.

b) Hukum Keluarga (*Familie Recht*):

Hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu: perkawinan serta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan isteri, hubungan antar orang tua dan anak, perwalian dan pengampuan dsb.

Hak dan kewajiban di bidang hukum keluarga pada dasarnya merupakan hak dan kewajiban yang tidak dapat

dinilai dengan uang, dan pada prinsipnya merupakan hubungan hukum yang sifatnya kekal (abadi).

Dalam KUHPerdara, hukum keluarga tersebut diatur dalam Buku I, yang berjudul tentang orang.

c) Hukum Kekayaan (*Vermogen Recht*):

Hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan harta kekayaan mereka atau mengatur mengenai hubungan hukum yang merupakan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Jika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang, yang dimaksudkan adalah segala hak dan kewajiban orang itu, yang dapat dinilai dengan uang. Hak dan kewajiban yang sifatnya demikian, lazimnya dapat dipindahtangankan kepada orang lain.

Hukum kekayaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1. *Hukum Kekayaan yang sifatnya Absolut (mutlak)*;

Hukum kekayaan yang sifatnya absolut menggambarkan hubungan antara orang dengan benda dan merupakan hak kebendaan yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hak kebendaan dapat dipertahankan

terhadap setiap orang yang bermaksud mengganggu
gak kebendaan tersebut. Misalnya : Hak Milik.

2. *Hukum Kekayaan yang sifatnya Relatif*; Hukum
kekayaan yang sifatnya relatif, lahir dari perjanjian
yang sifatnya relatif, artinya hanya dapat
dipertahankan terhadap orang-orang tertentu saja,
yakni orang yang terikat di dalam perjanjian itu saja.
Hukum kekayaan yang bersifat relatif ini lazim
disebut Hak Perorangan, yakni hak yang lahir dari
perjanjian yang mengatur hak-hak atau prestasi.
Misalnya hak seorang penjual atas harga penjualan.

d) Hukum Waris (*Erf Recht*):

Mengatur mengenai harta benda seseorang setelah ia
meninggal dunia. Mengatur mengenai beralihnya hak dan
kewajiban pewaris di bidang kekayaan (hak dan kewajiban
yang dapat dinilai dengan uang) kepada ahli warisnya. Dengan
demikian sebenarnya hukum waris merupakan bagian dari
hukum harta benda. Namun demikian hukum waris juga erat
kaitannya dengan hukum keluarga, oleh karena untuk
mewaris ialah mereka yang mempunyai hubungan darah
(keluarga) dengan pewaris. Hukum waris juga erat kaitannya
dengan hukum kekayaan yang sifatnya relatif, yang lahir dari
perjanjian, sehingga berdasarkan hal tersebut maka dalam

ilmu hukum terdapat kecenderungan pendapat yang berpendirian bahwa sebaiknya hukum waris diatur tersendiri.¹⁴

5. Tahapan-tahapan Peradilan Perdata

Pada dasarnya hukum acara perdata dapat dibagi dalam garis besarnya menjadi tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan atau permulaan, tahap penentuan, dan tahap pelaksanaan.

1) Tahap Pendahuluan

Tahap pendahuluan adalah tahap sebelum acara pemeriksaan di persidangan, yaitu tahap untuk mempersiapkan segala sesuatunya guna pemeriksaan perkara di persidangan pengadilan. Termasuk dalam tahap pendahuluan hukum acara perdata antara lain: pencatatan perkara dalam daftar oleh panitera, penepatan persekot biaya perkara dan penetapan berita acara prodeo, penetapan hari sidang, panggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara, memajukan permohonan penyitaan jaminan dan pencabutan gugatan.

2) Tahap Penentuan

Tahap penentuan ialah tahap mengenai jalannya proses pemeriksaan perkara di persidangan, mulai dari pemeriksaan peristiwanya dalam jawab-menjawab, pembuktian peristiwa sampai pada pengambilan putusan oleh hakim.

¹⁴ Hukum Perdata, pengertian dan ruang lingkupnya, <http://ayobelajarkhukum.blogspot.com/2011/11/hukum-perdata.html>, diakses pada tanggal 3/10/2013

3) Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan yaitu tahap untuk merealisasikan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap sampai selesai.

B. Gugatan

1. Definisi Gugatan

- a) Menurut RUU Hukum Acara Perdata pada Pasal 1 angka 2, gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.
- b) Menurut Sudikno Mertokusumo, tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrichting*).
- c) Menurut Darwan Prinst, gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.

2. Bentuk-bentuk Gugatan

Dalam *Herziene Indonesische Reglement* (“**HIR**”) dikenal 2 (dua) macam bentuk surat gugatan yaitu;

1. Gugatan Tertulis

Bentuk gugatan tertulis adalah yang paling diutamakan di hadapan pengadilan daripada bentuk lainnya. Gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR / Pasal 142 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (“**RBg**”) yang menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan kepada Pengadilan Negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Dengan demikian, yang berhak dan berwenang dalam mengajukan surat gugatan adalah; (i) penggugat dan atau (ii) kuasanya.

2. Gugatan Lisan

Bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata, karena bentuk gugatan lisan diatur dalam Pasal 120 HIR (Pasal 144 RBg) yang berbunyi: *“bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatan atau menyuruh mencatatnya”*. Ketentuan gugatan lisan yang diatur HIR ini, selain untuk mengakomodir kepentingan penggugat buta huruf yang jumlahnya masih sangat banyak di Indonesia pada masa pembentukan peraturan ini, juga membantu rakyat kecil yang tidak mampu menunjuk jasa seorang advokat atau kuasa hukum karena

dapat memperoleh bantuan dari Ketua Pengadilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata untuk membuat gugatan yang diinginkannya.

Menurut Pasal 8 BRv gugatan memuat :

1. Identitas para pihak, yaitu keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang berpekara seperti nama, tempat tinggal, pekerjaan, agama, umur, dan status kawin.
2. Dasar atau dalil gugatan/ posita /fundamentum petendi berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum. Fundamentum petendi (*posita*) adalah dasar dari gugatan yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berpekara (penggugat dan tergugat) yang terdiri dari 2 bagian yaitu : 1) uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*eittelijke gronden*) adalah merupakan penjelasan duduk perkaranya, 2) uraian tentang hukumnya (*rechtsgronden*) adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan
3. Tuntutan/petitum adalah yang dimohon atau dituntut supaya diputuskan pengadilan. Jadi, petitum ini akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan pengadilan. Karena itu, penggugat harus merumuskan

petitum tersebut dengan jelas dan tegas, kalau tidak bisa menyebabkan gugatan tidak dapat diterima. Dalam praktek ada 2 petitum yaitu :

- 1) Tuntutan pokok (*primair*) yaitu tuntutan utama yang diminta
- 2) Tuntutan tambahan/pelengkap (*subsidaire*) yaitu berupa tuntutan agar tergugat membayar ongkos perkara, tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit vierbaar bij vorraad*), tuntutan agar tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*), tuntutan akan nafkah bagi istri atau pembagian harta bersama dalam hal gugatan perceraian, dsb.

3. Jenis- jenis Gugatan

Menurut Yahya Harahap, gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum terdapat perbedaan prinsip yaitu:

a) Gugatan wanprestasi (ingkar janji)

Ditinjau dari sumber hukumnya, wanprestasi menurut Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") timbul dari perjanjian (*agreement*). Oleh karena itu, wanprestasi tidak mungkin timbul tanpa

adanya perjanjian yang dibuat terlebih dahulu diantara para pihak. Hak menuntut ganti kerugian karena wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUH Perdata, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai dengan surat peringatan (somasi). KUH Perdata juga telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti kerugian yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti kerugian yang dapat dituntut dalam wanprestasi.

b) Gugatan PMH

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, PMH timbul karena perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Hak menuntut ganti kerugian karena PMH tidak perlu somasi. Kapan saja terjadi PMH, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi tersebut. KUH Perdata tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian, bisa digugat ganti kerugian yang nyata-nyata diderita dan dapat diperhitungkan (material) dan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang (immaterial).

Agar Pengugat dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan PMH, maka harus dipenuhi unsur-unsur yaitu:

1. Harus ada perbuatan, yang dimaksud perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum. Istilah Melawan Hukum telah diartikan secara luas, yaitu tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan tetapi juga dapat berupa:
 1. Melanggar hak orang lain.
 2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
 3. Bertentangan dengan kesusilaan.
 4. Bertentangan dengan kepentingan umum.
3. Adanya kesalahan;
4. Ada kerugian, baik materil maupun immateril;
5. Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan ,melawan hukum tersebut dengan kerugian.¹⁵

C. Gugatan Kelompok (*Class Action*) Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia

1. Sejarah Gugatan Kelompok (*Class Action*) dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia

Di Indonesia acara gugatan perwakilan kelompok tidak dikenal dan tidak diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku baik dalam HIR maupun RBg. Sebelum tahun 1997, meskipun belum ada aturan

¹⁵ Hukum Acara Perdata, Jenis-jenis Gugatan Perkara Yang Lazim Diajukan di Peradilan Umum, , <http://www.hukumacaraperdata.com/2012/05/14/jenis-jenis-gugatan-perkara-perdata-yang-lazim-diajukan-di-peradilan-umum/> dikunjungi tanggal 5/10/2013

hukum yang mengatur mengenai *class action*, namun gugatan *class action* sudah pernah dipraktekkan dalam dunia peradilan di Indonesia. Gugatan *class action* yang pertama di Indonesia dimulai pada tahun 1987 terhadap Kasus R.O. Tambunan melawan Bentoel Remaja, Perusahaan Iklan, dan Radio Swasta Niaga Prambors. Perkara Bentoel Remaja yang diajukan di PN Jakarta Pusat.

Menyusul kemudian Kasus Muchtar Pakpahan melawan Gubernur DKI Jakarta & Kakanwil Kesehatan DKI (kasus Endemi demam Berdarah) di PN Jakarta Pusat pada tahun 1988 dan Kasus YLKI melawan PT. PLN Persero (kasus pemadaman listrik se-Jawa Bali tanggal 13 April 1997) pada tahun 1997 di PN Jakarta Selatan. Dalam gugatan Bentoel Remaja, Pengacara R.O. Tambunan mendalilkan dalam gugatannya bahwa ia tidak hanya mewakili dirinya sebagai orang tua dari anaknya namun juga mewakili seluruh generasi muda yang diracuni karena iklan perusahaan rokok Bentoel. Dalam kasus demam berdarah, pengacara Muchtar Pakpahan selaku penggugat mendalilkan bahwa ia bertindak untuk kepentingan diri sendiri sebagai korban wabah demam berdarah maupun mewakili masyarakat penduduk DKI Jakarta lainnya yang menderita wabah serupa.

Dari ketiga kasus *class action* di atas sayangnya tidak ada satupun gugatan yang dapat diterima oleh pengadilan dengan pertimbangan:

- a) Gugatan *class action* bertentangan dengan adagium hukum yang berlaku bahwa tidak ada kepentingan maka tidak aksi (*point d'intetrest, point d'action*). Hal ini diperkuat dalam yurisprudensi MA dalam putusannya pada tahun 1971 yang mengisyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang memiliki hubungan hukum.
- b) Pihak penggugat tidak berdasarkan pada suatu Surat Khusus, dalam 123 HIR disebutkan bahwa untuk dapat mewakili pihak lain yang tidak ada hubungan hukum diperlukan suatu Surat Khusus.
- c) Belum ada hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai gugatan *class action*, baik soal definisi maupun prosedural mengajukan gugatan *class action* ke pengadilan.

Bahwa *class action* lebih didominasi di negara yang menganut stelsel hukum *Aglo Saxon*, sementara tradisi hukum di Indonesia lebih dominann dipengaruhi oleh stelsel hukum Eropa Kontinental.¹⁶

Dalam UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mulai dikenalkan kemungkinan diajukan gugatan perwakilan kelompok, dan kemudian disusul dengan UU Perlindungan Konsumen, dan UU Kehutanan, namun bagaimana acara

¹⁶ Emerson Yuntho, S.H. dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *Class Action Sebuah Pengantar*, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005

pelaksanaanya tidak diatur kemudian dalam peraturan pemerintah. Namun sampai sekarang peraturan pemerintah yang diharapkan belum ada. Sejak itu, muncul gugatan-gugatan perwakilan kelompok baik yang mengatasnamakan masyarakat korban pencemaran lingkungan, atau gugatan yang di ajukan atas nama dan kepentingan konsumen, maupun gugatan kelompok yang ditujukan kepada pemerintah pusat maupun daerah karena adanya kelalaian dalam pengelolaan. Karena pada saat itu acara penerapannya belum ada, maka terjadi ketidakpastian hukum dalam penerapan putusan hakim, mulai dengan putusan tidak dapat diterima karena aturan hukumnya tidak ada, sampai pada putusan hakim yang mengadopsi dari putusan-putusan asing baik dari Amerika, Kanada, Maupun Australia. Berdasarkan kekosongan ini, maka oleh Mahkamah Agung RI diterbitkan PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang “Tata Cara Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok”. Dengan adanya PERMA ini, maka landasan penerapan gugatan *class action* di Indonesia akan berlandaskan pada acara yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2002.¹⁷

2. Pengertian Gugatan Kelompok (*Class Action*)

Istilah *Class Action* berasal dari bahasa Inggris, yakni gabungan dari kata *class* dan *action*. Pengertian *class* adalah sekelompok orang, benda, kualitas, atau kegiatan yang mempunyai kesamaan sifat atau

¹⁶ Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., *Class Action & Perbandingannya Dengan Negara Lain*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 31.

ciri, sedangkan pengertian *action* dalam dunia hukum adalah tuntutan yang diajukan ke pengadilan. *Class Action* digambarkan sebagai suatu pengertian dimana sekelompok besar orang yang berkepentingan dalam suatu perkara, satu atau lebih dari mereka dapat menuntut atau dituntut mewakili kelompok besar orang tersebut tanpa harus menyebutkan satu per satu anggota kelompok yang di wakili.¹⁸

Mas Achmad Santosa menerjemahkan *Class Action* sebagai Gugatan Perwakilan (kelompok) dan memberikan pengertian *Class Action* sebagai :

“Prosedur beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak prosedural terhadap satu atau sejumlah orang (jumlah yang tidak banyak), bertindak sebagai penggugat itu sendiri, dan sekaligus mewakili kepentingan ratusan, ribuan, ratusan ribu bahkan jutaan orang lainnya yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian.”¹⁹

Adapun pengertian *Class Action* secara umum ialah :
Class Action merupakan sinonim *class suit* atau *representative action* yang berarti :

- a) Gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa

¹⁸Ibid, hlm.6

¹⁹Indro Sugianto, S.H, M.H., *Class Action Konsep dan Strategi Gugatan Kelompok untuk Membuka Akses Keadilan Bagi Rakyat*, Setara Press, Malang, 2013, Hal. 7.

orang yang bertindak sebagai wakil kelompok (*class representative*);

- b) Perwakilan kelompok itu bertindak mengajukan gugatan tidak hanya untuk dan atas nama mereka, tetapi sekaligus untuk dan atas nama kelompok yang mereka wakili, tanpa memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok;
- c) Dalam pengajuan gugatan tersebut, tidak perlu disebutkan secara individual satu persatu identitas anggota kelompok yang diwakili;
- d) Yang penting, asal kelompok yang diwakili dapat didefinisikan identifikasi anggota kelompok secara spesifik;
- e) Selain itu antara seluruh anggota kelompok, dengan wakil kelompok terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum yang melahirkan :
 - Kesamaan kepentingan (*common interest*),
 - Kesamaan penderitaan (*common grievance*),
dan
 - Apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota.

Dan apabila dalam kenyataan terdapat persaingan kepentingan (*competing interest*) di

antar anggota kelompok, tidak dapat dibenarkan mengajukan gugatan melalui *Class Action*.²⁰

D. Putusan Pengadilan

Tujuan dari suatu proses di muka pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan bagaimanakah hukumnya dalam suatu kasus, yaitu bagaimanakah hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu seharusnya dan agar segala apa yang ditetapkan itu direalisasikan, jika perlu dengan paksaan.

Putusan pengadilan adalah merupakan salah satu dari hukum acara formil yang akan dijalani oleh para pihak yang terkait dalam perkara perdata. Dari beberapa proses yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara, putusan dan bagaimana putusan itu dilaksanakan adalah tahapan yang menjadi tujuan. Oleh karena itu penulis akan menguraikan secara lebih detail bagaimana tata cara dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh hakim dalam membuat sebuah putusan. Karena apabila terdapat suatu yang belum atau tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan atau syarat yang telah ditetapkan

²⁰M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, hal.139-140.

oleh undang-undang maka putusan yang dihasilkan menjadi cacat hukum dan bahkan akan menjadi batal demi hukum.

1. Asas – Asas Putusan

Adapun asas-asas putusan yang harus ditegakkan agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat yang dijelaskan pada pasal 178 HIR, 189 RGB dan pasal 19 UU No.4 Tahun 2004 ialah sebagai berikut:

1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan:

- pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan
- hukum kebiasaan
- yurisprudensi, atau
- doktrin hukum.

2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua, digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2), dan Pasal 50 Rv. Putusan harus

secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang.

6. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Asas lain, digariskan pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum* harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun dalam kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik.

7. Diucapkan di Muka Umum

- a. Prinsip Keterbukaan untuk Umum Bersifat Imperative
- b. Akibat Hukum atas Pelanggaran Asas Keterbukaan
- c. Dalam Hal Pemeriksaan secara Tertutup, Putusan Tetap Diucapkan dalam Sidang Terbuka
- d. Diucapkan dalam Sidang Pengadilan
- e. Radio dan Televisi dapat Menyiarkan Langsung Pemeriksaan dari Ruang Sidang²¹

2. Jenis-jenis Putusan:

Dalam penyusunan Hukum Acara Perdata telah dibuat sedemikian rupa agar prosesnya dapat berjalan secara cepat, sederhana, mudah dimengerti dan tentunya dengan biaya yang murah. Menurut bentuknya penyelesaian perkara oleh pengadilan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Putusan / vonis : Suatu putusan diambil untuk memutusi suatu perkara
2. Penetapan/*beschikking* : suatu penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan yaitu dalam rangka yang dinamakan "*yuridiksi voluntair*"

Sedangkan menurut golongannya, suatu putusan pengadilan dikenal dua macam pengolongan putusan yakni :

²¹Ibid. Hal.803

1. Putusan Sela (Putusan *interlokutoir*)

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam hukum acara dikenal macam putusan sela yaitu:

- 1) Putusan *Preparatuir*, putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir.
- 2) Putusan *Interlocutoir*, putusan yang isinya memerintahkan pembuktian karena putusan ini menyangkut pembuktian maka putusan ini akan mempengaruhi putusan akhir.
- 3) Putusan *Incidental*, putusan yang berhubungan dengan insiden yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa.
- 4) Putusan provisional, putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahulu guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.

2. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri

perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan MA. Macam-macam putusan akhir adalah sbb. :

- 1) Putusan *Declaratoir*, putusan yang sifatnya hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata, misalnya menerangkan bahwa A adalah ahli waris dari B dan C.
- 2) Putusan *Constitutif*, putusan yang sifatnya meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru, misalnya putusan yang menyatakan seseorang jatuh pailit.
- 3) Putusan *Condemnatoir*, putusan yang berisi penghukuman, misalnya pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya untuk membayar hutangnya.²²

3. Formulasi Putusan

Maksud formulasi putusan adalah susunan atau sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat perundang-undangan. Secara garis besar,

²²Putusan dan Jenis-jenis Putusan, <http://www.santoslolowang.com/putusan-dan-jenis-jenis-putusan/>, Dikunjungi 14 November 2013

formulasi putusan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 RBG. Apabila putusan yang dijatuhkan tidak mengikuti susunan perumusan yang digariskan pasal diatas, putusan tidak sah dan harus dibatalkan.²³ Beberapa unsur formula yang harus tercantum dalam putusan, yaitu :

1. Memuat secara ringkas dan jelas pokok perkara, jawaban, pertimbangan dan amar putusan.

- a. Dalil Gugatan

Dalil gugatan atau *fundamentum petendi* dijelaskan dengan singkat dasar hukum dan hubungan hukum serta fakta yang menjadi dasar gugatan.

- b. Mencantumkan jawaban tergugat

Keharusan mencantumkan jawaban tergugat menurut pasal 184 ayat (1) HIR cukup dengan ringkas, tidak mesti keseluruhan.

- c. Uraian singkat ringkasan dan lingkup pembuktian

Uraian selanjutnya deskripsi fakta dan alat bukti atau pembuktian yang ringkas dan lengkap.

- d. Pertimbangan hukum

Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi

²³M. Yahya Harahap, Op Cit, hal.807

analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.

e. Ketentuan Perundang-undangan

Biasanya sudah baku menempatkan pokok masalah ini dalam putusan pada bagian memperhatikan. Dengan demikian penempatannya dalam putusan setelah uraian pertimbangan.

f. Amar putusan

Amar atau dictum putusan merupakan pernyataan (*deklarasi*) yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak dengan barang objek yang disengketakan. Dan juga berisi perintah atau penghukuman atau *condemnatoir* yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara.

2. Mencantumkan Biaya Perkara

Hal lain yang mesti tercantum dalam formulasi putusan berkenaan dengan biaya perkara.pencantumannya dalam putusan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 187 (1) RBG. Mengenai prinsip dan komponen biaya perkara diatur dalam Pasal 181-182 HIR, Pasal192-194 RBG. Merujuk kepada pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan

Pasal 189 ayat (1) HIR,dapat dijelaskan hal-hal berikut.

a. Prinsip Pembebasan Biaya Perkara

Merujuk kepada pasal 181 ayat (1) HIR, Pasal 192 ayat (1) RBG digariskan prinsip pembebanan biaya perkara.

1. Dibebankan kepada Pihak yang kalah
2. Kemenangan Tidak Mutlak, Dibebankan secara Berimbang

- a) Gugatan hanya dikabulkan sebagian
- b) Gugatan penguat dinyatakan tidak dapat diterima

b. Pembenan Meliputi Biaya Putusan Sela

Jika dalam proses pemeriksaan ada dijatuhkan putusan sela, dan untuk itu diperlukan biaya maka biaya tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah.Atau sekiranya biaya dipikulkan kepada para pihak secara berimbang, pembagian biaya itu, meliputi juga biaya putusan sela.

c. Biaya Putusan Verstek kepada yang Dijatuh Verstek

Mengenai hal ini diatur dalm Pasal 181 ayat (3) HIR. Apabila putusan dijatuhkan melalui

proses *verstek*, kepada yang dijatuhi putusan itu, sekaligus dibebani membayar biaya perkara.

d. Pembebanan Biaya Tambahan Pemanggilan

Tentang ini digariskan dalam Pasal 181 ayat (4) HIR. Sekiranya diluar biaya yang diperkirakan semula diperlukan biaya tambahan untuk melakukan pemanggilan ulang kepada seorang atau beberapa orang tergugat sesuai ketentuan Pasal 127 HIR.

e. Komponen Biaya Perkara

Mengenai komponen biaya perkara ditentukan secara *enumerative* dalam Pasal 182 HIR, Pasal 193 RGB. Hakim tidak boleh melampaui ketentuan tersebut.²⁴

²⁴M. Yahya Harahap, Op Cit, Hal. 807

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan, diperlukan suatu metode penelitian ataupun pedoman dalam melakukan penelitian, sebab dengan menggunakan metode penelitian atau pedoman penelitian yang tepat dan benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah penulis dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah.

A. Tipe Penelitian

1. Penelitian Normatif

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian normatif yakni, melalui peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian, selain itu menggunakan literatur berupa, buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dll.

2. Penelitian Empiris

Yaitu, penulis akan melakukan penelitian di instansi yang terkait yaitu pengadilan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang ada kaitannya dengan judul yang akan diteliti dengan cara melakukan wawancara sesuai dengan kepakarannya.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan proposal ini, penulis akan melakukan penelitian melalui studi keperpustakaan dengan membaca ataupun menganalisa

bahan-bahan yang tertulis yang dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian juga akan dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dan di beberapa tempat lainnya.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

i. Bahan hukum Primer

Data primer data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan tulisan ini.

ii. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, media online, media cetak, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya yang berhubungan dengan tulisan ini.

iii. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan politik, ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan tulisan ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi literatur, yang ditujukan untuk memperoleh bahan-bahan dan

informasi-informasi sekunder yang diperlukan dan relevan dengan penelitian, yang bersumber dari buku-buku, media pemberitaan, jurnal, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti data yang terdokumentasikan melalui situs internet yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara yang dilakukan langsung dengan pihak-pihak yang dianggap berkompeten dalam penulisan ini.

E. Analisis Data

Analisis data primer dan sekunder yang telah diperoleh, penulis kemudian membandingkan data tersebut. Penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dalam menganalisis data yang ada untuk menghasilkan kesimpulan dan saran. Data tersebut kemudian dituliskan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penerapan *Class Action* dalam Praktik Peradilan Perdata

Dalam praktik peradilan perdata, *class action* merupakan suatu prosedur dalam gugatan keperdataan yang menyelenggarakan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah HIR atau RBg yang ternyata tidak mengenal adanya konsep prosedur gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) ini.

Aturan hukum tidak bersifat statis, tetapi bergerak dinamis dari waktu ke waktu mengikuti tuntutan perkembangan zaman demi tercapainya keseimbangan. Sebagaimana telah disebutkan dalam bab terdahulu, sampai saat ini ada sekitar 3 (tiga) Undang-undang di Indonesia yang telah memberikan pengakuan atau pengaturan tentang prosedur *Class actions*, sebelum adanya PERMA nomor 1 tahun 2002, yakni:

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup Pasal 37 ayat (1). Didalam pasal tersebut dinyatakan bahwa:

“Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.”

b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen Pasal 46 ayat (1). Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan:

“ ...Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau *class action*. Gugatan kelompok ini atau *class action* harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah bukti transaksi.”

c. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 71 ayat (1), menyebutkan:

“ Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat.”²⁵

Namun sampai sekarang peraturan pemerintah yang mengatur tentang acara gugatan perwakilan kelompok ini belum ada. Karena pada saat itu acara penerapannya belum ada, maka terjadi ketidakpastian hukum dalam penerapan putusan hakim. Ada beberapa komponen kepastian hukum, antara lain:

²⁵ Indro Sugianto., *Class Action Konsep dan Strategi Gugatan Kelompok untuk Membuka Akses Keadilan Bagi Masyarakat*, Setara Press, Malang, 2013, hal. 59-61

1. kepastian aturan hukum yang akan di terapkan;
2. kepastian proses hukum, baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan hukum;
3. kepastian kewenangan yaitu kepastian lingkungan jabatan atau pejabat yang berwenang menetapkan atau mengambil suatu keputusan hukum;
4. kepastian waktu dalam setiap proses hukum; dan
5. kepastian pelaksanaan, seperti kepastian eksekusi putusan hakim, atau keputusan administrasi negara.²⁶

Segala ketidakpastian hukum dalam putusan hakim terjadi seperti putusan tidak diterima karena aturan hukumnya tidak ada, sampai pada putusan hakim yang mengadopsi dari putusan-putusan asing baik dari Amerika, Kanada, maupun Australia. Berdasarkan kekosongan ini, maka oleh Mahkamah Agung RI diterbitkan PERMA No.1 Tahun 2002 tentang “Tata Cara Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok”. Dengan adanya perma ini, maka landasan penerapan gugatan *class action* di Indonesia berlandaskan pada acara yang diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2002.”²⁷

Dalam perkembangannya ternyata beberapa tahun setelah PERMA No.1 Tahun 2002 di keluarkan, terdapat kekosongan yang tidak diatur oleh sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya yang tidak

²⁶ Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No.4 Tahun 2004, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hal.20

²⁷ Susanti Adi Nugroho, Class Action & Perbandingannya dengan Negara Lain, Kencana, Jakarta, 2010, hal.31

diduga sebelumnya, seperti adanya beberapa gugatan perwakilan kelompok yang ditujukan kepada tergugat yang sama, yang diajukan di beberapa pengadilan berbeda, apakah dimungkinkan untuk di gabungkan menjadi satu perkara saja, agar pihak tergugat tidak melayani perkara yang sama yang diajukan oleh wakil kelas yang berbeda di pengadilan yang berbeda. Jika hal ini dimungkinkan bagaimana mekanisme penggabungan perkara.²⁸

Kekosongan lain yang tidak diatur, bagaimana cara merealisasi atau membagi ganti kerugian kepada anggota-anggota kelompok yang berjumlah banyak, yang berada di wilayah pengadilan yang berbeda jika kemudian gugatan kelompok tersebut dikabulkan. Karena berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, eksekusi suatu putusan hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Negeri mana yang harus membagikan ganti rugi yang dikabulkan, karena anggota kelompok yang berjumlah banyak tersebar di beberapa wilayah pengadilan yang berbeda. Dan bagaimana anggota kelas membuktikan tentang keikutsertaannya dalam kelompok, atau membuktikan kerugiannya sehingga ia berhak mendapat bagian dari ganti rugi yang dikabulkan. Hal tersebut tidak diatur dalam PERMA.²⁹

“PERMA No.1 Tahun 2002 merupakan regulasi atau ketentuan yang berisi acuan sebagai hukum acara dalam perkara gugatan

²⁸ Ibid, hal. 32

²⁹ Lot-cit.

perwakilan kelompok, karena itu proses beracara mengacu kepada hukum acara yang berlaku, juga mengacu kepada PERMA. Tidak ada alternative lain selain menerapkan perma itu.”³⁰ Pernyataan tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa, dalam melakukan proses beracara gugatan perwakilan kelompok (*class action*) hanya mengacu kepada PERMA tersebut.

1. Syarat-syarat Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)

Sebenarnya jika diperhatikan ketentuan Pasal 3 PERMA, hampir terdapat persamaan syarat-syarat formulasi gugatan yang diatur dalam HIR atau RBG. Namun demikian, untuk mendapat gambaran yang jelas, akan dikemukakan secara ringkas deskripsinya sebagai berikut :

- a. Mencantumkan dan mengalamatkan gugatan berdasarkan kompetensi relatif (*Yurisdiksi Relatif*) sesuai dengan sistem dan patokan yang digariskan Pasal 118 HIR.
- b. Mencantumkan tanggal pada gugatan meskipun pencantuman itu tidak diatur secara tegas, namun dalam praktik peradilan telah dianggap sebagai salah satu syarat formulasi gugatan, meskipun sifatnya tidak imperaktif

³⁰Wawancara dengan bapak Ibrahim Paleno S.H,M.H-Hakim Pengadilan Negeri Makassar, 18 November 2013, Pengadilan Negeri Makassar.

(1) Gugatan ditandatangani penggugat atau kuasanya :

- Tanda tangan ditulis dengan tangan sendiri, berupa inisial nama penanda tangan;
- Boleh berbentuk cap jempol berdasarkan St. 1919-7776, apabila penggugat tidak pandai menulis;

(2) Menyebut identitas para pihak yang terdiri dari minimal seperti yang diatur Pasal 118 ayat (1) HIR;

- Nama lengkap dan alias (Jika ada)
- Alamat atau tempat tinggal

Apabila alamat dan tempat tinggal tergugat tidak diketahui, dapat dipedomani cara perumusan yang digariskan Pasal 390 ayat (3) HIR.

(3) Mencantumkan *fundamentum petendi* yang terdiri dari :

- Dasar hukum gugatan (*rechtelijke gronds*), dan
- Dasar fakta gugatan (*feitelike gronds*).

(4) Memuat *petitum* gugatan :

- Bisa berbentuk deskripsi tunggal,

- Boleh juga berbentuk alternatif atau subsidiary yang masing-masing dideskripsi atau berbentuk subsidair dalam bentuk *ex-aequo et bono*.

Itulah pokok-pokok formulasi gugatan secara umum.³¹

Adapun pendapat menurut bapak Yoga D.A Nugroho, syarat mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) terbagi atas dua, yaitu :

Syarat materil:

- a) Mencantumkan dan menyelamatkan gugatan berdasarkan kompetensi relati sesuai dengan system dan patokan yang digariskan pada pasal 118 HIR;
- b) mencantumkan tanggal pada gugatan ;
- c) gugatan ditanda tangani penggugat atau kuasanya;
- d) menyebut identitas para pribadi;
- e) mencantumkan fundamentum petendi;
- f) memuat petitum tentang ganti rugi;
- g) identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
- h) definisi kelompok secara rinci dan spesifik;
- i) keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;

³¹M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, hal.152

- j) posita dari seluruh kelompok, baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang teridentifikasi maupun tidak, dikemukakan secara jelas dan rinci;
- k) penegasan tentang beberapa bagian kelompok atau sub kelompok.

2. Syarat formil :

- a) adanya kelompok (*class*);
- b) kesamaan fakta atau dasar hukum;
- c) kesamaan jenis tuntutan.³²

Diantara syarat umum yang diatur dalam Hukum Acara, ada persyaratan khusus yang sama dengan ketentuan yang disebut pada Pasal 3 PERMA. Namun demikian, persyaratan itu akan di deskripsikan satu persatu, yang terdiri dari :

- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok, dalam hal ini yang dimaksudkan ialah wakil kelompok. Namun tidak mengurangi keharusan menyebut identitas tergugat sesuai dengan ketentuan umum yang digariskan Hukum Acara.
- b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebut nama anggota kelompok satu persatu. Dikemukakan kesimpulan mengenai patokan deskripsi kelompok dalam GPK dengan acuan :

³²Wawancara dengan bapak Yogo D.A Nugroho S.H., M.H.- Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Rabu, 20 November 2013, Pengadilan Negeri Sungguminasa

- Perumusan definisinya tidak bersifat deskripsi yang kabur (*unvague description*);
 - Tetapi juga tidak dituntut deskripsi yang terlampau spesifik;
 - Oleh karena itu, pada prinsipnya deskripsi yang dianggap memadai, asal dapat menghindari kesulitan mengelola pengadministrasian anggota kelompok yang bersangkutan.
- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan. Ketentuan ini tidak dijumpai dalam formulasi gugatan berdasarkan Hukum Acara. Karena dengan mencantumkan identitas para pihak, pemberitahuan atau panggilan sudah dapat dipenuhi, sebab secara riil mereka tampil dalam gugatan tidak demikian halnya dalam gugatan perwakilan kelompok (GPK), yang tampil secara nyata dalam dalam proses perkara hanya wakil kelompok (*class representative*), sedangkan identitas anggota kelompok adalah tersembunyi atau *in abseentee* dibalik identitas kelompok. Oleh karena itu, apabila satu saat diperlukan pemberitahuan kepada anggota kelompok, perlu diterangkan keberadaan mereka dalam gugatan dan keterangan itu sedemikian rupa sehingga

langkah tindakan pemberitahuan itu dapat terlaksana secara efektif.

- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi dikemukakan secara jelas dan rinci. Mengenai syarat ini, sama dengan ketentuan umum. Berarti harus jelas dasar hukum dan dasar fakta landasan dalil gugatan itu meliputi landasan gugatan bagi seluruh kelompok yang terdiri dari wakil dan anggota kelompok.
- e. Penegasan tentang beberapa bagian kelompok atau subkelompok. Syarat ini tidak bersifat imperatif secara permanen, tetapi secara kondisional, dengan acuan penerapan:
 - Sepanjang tidak ada secara objektif subkelompok berdasarkan perbedaan jenis dan jumlah ganti rugi, gugatan tidak perlu memuat hal itu;
 - Dengan demikian keharusan merumuskan penegasan sub kelompok dalam GPK, apabila hal itu secara nyata memang ada;
 - Dalam hal demikian GPK harus menyebut atau memformulasi:

Contohnya pada kasus gugatan *Class Action* atas Peredaran Susu Formula Bayi yang Mengandung Bakteri

Sakazaki Berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen pada

1. Dimana Tergugat I INSTITUT PERTANIAN BOGOR telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tertera dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berisi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. "Bahwa Tergugat telah melakukan penelitian yang diketuai oleh Dr. Sri Estuningsih yang dipublikasikan melalui Website Institut Pertanian Bogor (www.ipb.ac.id) pada tanggal 17 Februari 2008, dimana kesimpulan penelitian tersebut adalah bahwa di Indonesia terdapat susu formula dan makanan bayi yang terkontaminasi oleh *Enterobacter Sakazakii* yang dapat menghasilkan enterotoksin tahan panas yang menyebabkan terjadinya enteritis, sepsis dan meningitis pada model anak kecil neonates. Tergugat I hanya mempublikasikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, sedangkan mengenai produk susu formula apa saja (jenis dan namanya) yang telah terkontaminasi, tidak dipublikasikan oleh Tergugat.

Semenjak dikeluarkan dan dipublikasikannya hasil penelitian oleh Tergugat I tersebut, terjadi keresahan pada Penggugat dan masyarakat pada umumnya mengenai jenis dan nama produk susu formula yang terkontaminasi bakteri *Enterobacter Sakazakii* karena tidak dipublikasikan oleh Tergugat I.

2. Tergugat II BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN yang telah menerima hasil kesimpulan penelitian dari Tergugat I juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak memberikan penjelasan resmi mengenai nama dan jenis produk susu formula apasaja yang terkontaminasi walaupun itu merupakan kewajibannya. Tergugat II tidak pula melaksanakan kewajibannya dengan tidak mendesak Tergugat I untuk memberikan hasil penelitian, kemudian menelitinya lebih lanjut dan segera mengumumkan apapun hasilnya kepada masyarakat umum.

Tergugat III selaku Menteri Kesehatan Reublik Indonesia juga tidak melakukan kewajibannya sebagai institusi pemerintah dengan tidak memberikan penjelasan mengenai produkdan jenis susu apa saja yang telah

terkontaminasi *Enterobacter Sakazakii*. Justru Tergugat III meragukan hasil penelitian dan bahkan bersama-sama Tergugat II menyatakan bahwa produk-produk susu tersebut tidak beredar lagi.

Oleh karena pemberitaan yang semakin gencar, baik di media cetak maupun elektronik, maka Penggugat sebagai konsumen merasa sangat resah dan khawatir untuk membeli susu formula mengingat kebutuhan anak-anak Penggugat terhadap susu formula sangat tinggi dan tidak adanya pemberitahuan secara resmi dari Para Tergugat mengenai produk susu formula apa saja yang telah terkontaminasi *Enterobacter Sakazakii* telah menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat juga.

Legal Standing

1. Bahwa sebagai warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di DKI Jakarta, Penggugat memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warga Negara seperti tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama di hadapan hukum" ;

2. Bahwa Penggugat sebagai warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di DKI Jakarta berhak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992 Pasal 4 Tentang Kesehatan ;
3. Bahwa sebagai warga negara Indonesia yang berdomisili di DKI Jakarta, Penggugat memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa seperti yang tercantum dalam Pasal 4 huruf (a) dan mengenai informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sesuai dengan Pasal 4 (c) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ;
4. Bahwa Penggugatan dalah ayah dari dua orang anak yang masing-masing berumur di bawah lima tahun, yaitu: Bonauli M.L. Tobing, lahir pada tanggal 6 November 2004 (umur 3 tahun 4 bulan) dan Jethro M. L. Tobing lahir pada tanggal 24 Mei 2006 (umur 1 tahun 10 bulan) ;

5. Bahwa sejak dari bayi kedua anak Penggugat minum ASI secara eksklusif selama +/- 6 bulan, dan setelah masa 6 bulan tersebut anak Penggugat selalu minum susu formula sampai saat ini, dan sesuai dengan kandungan dan manfaat yang terdapat dalam susu formula, maka Penggugat selaku konsumen merasa perlu dan harus membeli susu formula untuk kedua anak Penggugat agar pertumbuhannya baik.³³

Dapat kita lihat pada uraian Legal Standing Putusan tersebut Penggugat David M.L Tobing, hanya memposisikan dirinya sebagai konsumen. Dalam hal ini pemohon tidak mewakili kelompok manapun seperti syarat, yaitu gugatan perwakilan kelompok memiliki penegasan tentang beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, sehingga dalam hal ini penulis menarik kesimpulan bahwa perkara tersebut bukan perkara *class action*.

- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi. Petitum tentang ganti rugi :
 - harus dikemukakan dengan jelas dan rinci;

³³ Putusan Perkara Nomor: 2975/K/Pdt/2009/PN.Jkt, Hal. 4-7

- memuat atau menjelaskan cara pendistribusian ganti rugi itu kepada seluruh anggota kelompok;
- usul pembentukan tim atau panel yang bertindak membantu kelancaran pendistribusian ganti rugi.³⁴

Pada dasarnya, ketentuan ini sama dengan aturan umum yang digariskan Hukum Acara, namun dalam GPK, terdapat tambahan formulasi mengenai pendistribusian dan tim yang membantu kelancaran ganti rugi.

Sedangkan menurut PERMA tata cara dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok diatur dalam BAB II Pasal 2 yang mengatur tentang gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila:

- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;
- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
- c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;

³⁴ M. Yahya Harahap, Op Cit, hal 153

- d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

Dalam Pasal 3 (1) selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:

- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
- b. Defenisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;
- e. Dalam satu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang

berbeda;

- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

Pasal 4 PERMA No.1 Tahun 2002 mengatur untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok. Selanjutnya, beberapa hal yang diatur dalam Pasal 5 ialah:

- (1) Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- (2) Hakim dapat memberikan nasihat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan
- (3) Sahnya gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan;

- (4) Apabila hakim memutuskan penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka segera setelah itu, hakim memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim;
- (5) Apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim.

Hakim berkewajiban mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 PERMA No.1 Tahun 2002.³⁵ Praktik selama ini Hakim mempersilahkan kedua belah pihak dalam suatu jangka waktu tertentu (relatif singkat) mengusahakan diri sendiri untuk menyelesaikan sengketa mereka. Dalam proses ini Hakim umumnya bersifat pasif. Peran Hakim terbatas pada memberi nasihat/petuah saja.³⁶

³⁵Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, BAB II Tata Cara dan Persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok

³⁶Nuraningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.96

2. Indikator Pembeda Jenis Kerugian

Adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok tidak serta-merta memberikan kepastian hukum dari gugatan perwakilan kelompok. Dari berbagai kasus yang ada, sangat banyak gugatan *class action* yang ditolak oleh hakim. Alasan penolakan tersebut sangat beragam, mulai dari tidak jelasnya definisi kelompok yang diwakili oleh kelompok yang mewakili, hingga sulitnya menentukan kesamaan dasar hukum terkait jenis kerugian yang dialami oleh kelompok tersebut.

Salah satu hal yang menjadi pokok pembahasan penulis pada penelitian ini adalah membahas mengenai indikator pembeda jenis kerugian sebagai salah satu syarat penting dalam menentukan kesamaan dasar hukum dalam mengajukan gugatan *class action*. Menurut bapak Muriadi Muchtar, jenis kerugian dibedakan berdasarkan kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok *class action*. Jadi tidak ada indikator pembeda jenis kerugian, yang ada ialah perbedaan kelompok berdasarkan jenis kerugian.³⁷ Misalnya pada kasus pencemaran sungai, masyarakat yang tinggal di daerah tersebut terdiri dari beberapa *class* masyarakat, misalnya masyarakat petani, nelayan, dan masyarakat yang bermukim di sekitar sungai (bukan petani dan bukan nelayan). Kerugian yang dialami para petani berbeda dengan kerugian yang dialami para

³⁷Wawancara dengan bapak Muriadi Muchtar S.H.-advokat, Kamis, 9 Januari 2014, Law Firm Muriadi Muchtar & Partner, Advokat dan legal consultant.

nelayan, begitupula dengan kerugian masyarakat yang bermukim di daerah sungai tersebut.

Dalam pasal 1365 KUHP dinyatakan bahwa, tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Namun didalam gugatan biasanya jenis kerugian di dirangkum menjadi 2 jenis, yaitu gugatan materil dan immateril. Undang-undang hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat materiil. Kemungkinan terjadi bahwa kerugian itu menimbulkan kerugian immaterial, tidak berwujud, moril, idiil, tidak dapat dinilai dengan uang, tidak ekonomis, yaitu berupa sakitnya badan, penderitaan batin, rasa takut, dan sebagainya.³⁸

Contohnya pada salah satu perkara *class action* dalam hal perlindungan konsumen, dimana Lembaga pembiayaan sering melakukan tindakan-tindakan yang tidak berprilaku manusiawi dan tidak berkeadilan, sering melakukan perampasan kendaraan-kendaraan konsumen di jalan dan sering melakukan tipu daya pada konsumen agar konsumen menyerahkan barangnya dengan dalih dititipkan sementara, setelah kendaraan berada di pihak Lembaga Pembiayaan, konsumen di persulit untuk mengambil kendaraannya kembali, untuk itulah Lembaga Perlindungan Konsumen terpanggil segera memberi bantuan advokasi pada konsumen terhadap keinginannya untuk

³¹Merry Joanda, Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jurnal Sasi Vol.16 No.4. Oktober-Desember 2010, hal.6.

mengajukan Gugatan dan Tuntutan Perwakilan Kelompok (*class action*). Pada perkara ini penggugat menuntut ganti rugi sejumlah uang dengan total kerugian Rp.221.070.000,- karena telah mengalami kerugian materiil. Para penggugat juga mengalami kerugian immateriil berupa stress yang berkepanjangan dan rasa ketakutan yang dituntut ganti rugi sebesar Rp. 8.000.000.000,-.³⁹

3. Manfaat Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, dalam kehidupan masyarakat, tidak dapat dipungkiri akan terjadi gesekan maupun perseteruan antara peraturan satu dengan aturan lainnya karena adanya perbedaan pendapat maupun pandangan yang dilatar belakangi oleh berbagai faktor.

Dalam perkembangan dewasa ini perlu didesain system peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan tetap pada prinsip keadilan menjadi tujuan. Hal inilah yang diharapkan oleh subjek hukumpencari keadilan dalam memperoleh keadilan dari badan peradilan di Indonesia.

Adapun tujuan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dalam PERMA adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan Penyederhanaan Akses Masyarakat Memperoleh Keadilan dengan satu gugatan, diberi hak prosedural terhadap satu atau beberapa orang bertindak

³⁹Perkara *Class Action*, Putusan Nomor : 33/PDT.G/2011/PN.Kdr, hal.5-13

sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan penggugat dan sekaligus kepentingan anggota kelompok (bisa ratusan atau ribuan anggota). Hal ini di kemukakan dan huruf a konsiderans⁴⁰ bahwa salah satu tujuan utama proses gugatan perwakilan kelompok untuk menegakkan asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan agar akses masyarakat terhadap pengadilan semakin dekat. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem *Class Action* yang dianggap mampu mengefektifkan atau mengefisienkan proses penyelesaian perkara yang menyangkut kelompok yang banyak anggotanya.

2. Mengefektifkan Efisiensi Penyelesaian Pelanggaran

Hukum yang Merugikan Orang Banyak. Melalui proses berperkara dengan system gugatan perwakilan kelompok dianggap efektif dan efisien, karena:

- Secara serentak atau sekaligus dan massal kepentingan kelompok, dibolehkan cukup hanya diajukan dalam satu gugatan saja.
- Hal itu dapat ditempuh apabila ternyata mereka memiliki fakta atau dasar hukum yang sama, berhadapan dengan gugatan yang sama.

⁴⁰Konsiderans merupakan pertimbangan yang menjadi dasar penetapan keputusan, peraturan, dsb.

- Sehingga apabila gugatan diselesaikan sendiri-sendiri, penyelesaian tidak efektif dan efisien, bahkan dimungkinkan terjadi putusan yang saling bertentangan.⁴¹

Kesederhanaan tata cara dan cepatnya penyelesaian perkara sama sekali tidak boleh menyebabkan kecermatan, ketelitian serta keadilan diabaikan, tetapi hanyalah memotong mata rantai proses yang lama dan berbelit-belit dalam mencapai dan menggapai keadilan.⁴² Dengan adanya prosedur *class action* maka proses berperkara menjadi sangat ekonomis dan pengulangan gugatan-gugatan serupa secara individual dapat dicegah. Tujuan utama dikembangkannya *class action* dalam perkara perdata yang melibatkan jumlah orang sangat banyak /massal adalah untuk mencapai efisiensi dalam berperkara. Tujuan lainnya adalah untuk memberikan akses pada keadilan dan sebagai peluang untuk menumbuhkan efek jera.

Adapun manfaat gugatan perwakilan kelompok seperti di negara-negara lain yang telah mempunyai prosedur gugatan *class action* pada umumnya, yaitu:

1. Agar proses berperkara lebih ekonomis dan biaya lebih efisien (*judicial economy*). Tidaklah ekonomis bagi

⁴¹ M. Yahya Harahap, Op Cit, hal.140

⁴² Sukarno Aburaera, Kekuasaan Kehakiman Indonesia, Arus Timur, Makassar, 2012, hal.15.

pengadilan jika harus melayani gugatan yang sejenis secara satu per satu. Manfaat ekonomis ini tidak saja dirasakan oleh penggugat, akan tetapi juga oleh tergugat, sebab dengan pengajuan gugatan secara *class action* tergugat hanya satu kali mengeluarkan biaya untuk melayani gugatan pihak-pihak yang dirugikan. Biaya pengacara melalui mekanisme *class action* akan lebih murah daripada gugatan masing-masing individu, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ganti kerugian yang akan diterima. Apabila jika biaya gugatan yang akan dikeluarkan tidak sebanding dengan tuntutan yang diajukan. Melalui gugatan *class action* ini, kendala ini dapat diatasi dengan cara saling menggabungkan diri bersama-sama dengan korban atau penderita yang lain dalam satu gugatan saja, yaitu gugatan perwakilan kelompok (*to save court costs in the handling of large cases, insolving many injured people*).

2. Memberikan akses pada keadilan (*access to justice*), dan mengurangi hambatan-hambatan bagi penggugat individual yang pada umumnya berposisi lebih lemah untuk memperjuangkan haknya di pengadilan (*the right of groups of people who individually would be without effective strength to bring their opponents into court*). Melalui gugatan *class action* hambatan-hambatan ini dapat diatasi dengan cara

mereka yang menderita kerugian menggabungkan diri bersama-sama anggota kelas yang lain dalam satu gugatan perwakilan kelompok.

3. Mengubah sikap pelaku pelanggaran dan menumbuhkan sikap jera yang mereka berpotensi untuk merugikan kepentingan masyarakat luas (*behavior modification to punish corporate wrong doing and to force corporate to pay for any harm they have caused*). Dengan diterapkannya prosedur *class action* berarti mendorong setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan baik swasta maupun pemerintah untuk bertindak lebih hati-hati dalam menjalankan usahanya.
4. Penerapan gugatan perwakilan kelompok ini sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kekuasaan kehakiman bahwa peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.
5. Mencegah pengulangan proses perkara yang dapat berakibat putusan yang berbeda atau tidak konsisten antara pengadilan atau jenis majelis hakim yang satu dengan majelis yang lain, jika tuntutan tersebut diajukan secara individual.⁴³

Selain gugatan *class action*, salah satu wujud dari asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan

⁴³ Susanti Adi Nugroho, Op Cit, Hal. 34.

transparan adalah model kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering*. Kumulasi gugatan adalah penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. HIR tidak mengatur hal penggabungan gugatan, maka terserah Hakim dalam hal mana diizinkan asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah.⁴⁴ Namun Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain.⁴⁵ Misalnya gugatan perdata umum digabungkan dengan gugatan perdata khusus, seperti gugatan tentang PMH dan tuntutan ganti rugi digabungkan dengan perkara mengenai hak atas Merek (*Merkenrecht*); vide ketentuan-ketentuan tentang HAKI.

Secara teoritis dikenal dua macam komulasi gugatan, yaitu:

1. Komulasi obyektif, penggabungan beberapa objek atau tuntutan ke dalam satu surat gugatan perkara sekaligus. Dengan kata lain, tuntutan beraneka macam tetapi perkaranya tunggal.
2. Komulasi subyektif, penggabungan dua atau lebih subyek hukum dalam satu surat gugatan. Undang-Undang tidak melarang penggugat mengajukan gugatan terhadap beberapa

⁴⁴ Hukum Acara Perdata, *Penggabungan Gugatan*, diakses dari <http://www.hukumacaraperdata.com/2012/08/14/penggabungan-gugatan/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2014, Pukul 13.25 WITA.

⁴⁵Lot Cit.

orang tergugat, sesuai dengan pasal 4, 81, 107 Rv, 127 HIR, 151 RBg, 1283, 1284 BW, 18 WvK. Terhadap komulasi subyektif ini tergugat dapat mengajukan keberatannya kepada hakim, demikian pula sebaliknya tergugat diberikan hak untuk meminta dilakukan komulasi subyektif, yaitu mengikutsertakan tergugat-tergugat lain dalam satu gugatan yang sama.

Perlu diketahui bahwa kumulasi gugatan berbeda dengan gugatan *class action*. Meskipun keduanya merupakan wujud dari asas penyelenggaraan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dan untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan, namun keduanya memiliki sisi yang berbeda. Gugatan *class action* adalah model gugatan yang lebih khusus dari jenis kumulasi gugatan, yaitu terdapat suatu kelompok yang mewakili kelompok-kelompok tertentu dan diri mereka sendiri yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum.

Gugatan *class action* dapat memenuhi kumulasi subjektif gugatan, sebab dalam Perma no. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, tidak melarang untuk diajukannya gugatan terhadap beberapa pihak. Hal tersebut sangat dimungkinkan jika para penggugat dalam *class action* merasa bahwa terdapat beberapa pihak yang menyebabkan kerugian terhadap mereka. Dalam hal tuntutan juga dimungkinkan adanya kumulasi objektif, sebab sangat mungkin

terdapat perbedaan tuntutan diantara kelompok-kelompok yang diwakili dalam gugatan *class action*.

B. Kekurangan PERMA terhadap Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

Seperti yang kita ketahui PERMA No.1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok (*class action*) merupakan dasar hukum berlakunya gugatan perwakilan kelompok dalam proses peradilan. Yang dimana gugatan *class action* memiliki banyak manfaat, akan tetapi PERMA yang mengaturnya masih memiliki banyak kekurangan-kekurangan yang tidak lepas dari kritikan-kritikan, antara lain:

1. Bahwa dalam gugatan *class action* anggota kelas pada umumnya menerima ganti rugi yang jumlahnya kecil.
2. Jika kesepakatan perdamaian (*class settlement*) dengan pihak tergugat dapat tercapai, anggota kelas hanya menerima keuntungan yang kecil dari hasil perdamaian tersebut. Meskipun peraturan memungkinkan anggota kelas untuk tidak menyetujui kesepakatan perdamaian yang diajukan, tetapi sering kali tidak ada pemberitahuan mengenai hak untuk *opt-out* terhadap isi perdamaian yang tidak disetujuinya, atau sering kali juga anggota kelas tidak tahu karena tidak membaca pemberitahuan atau tidak mengerti. Dalam *Class Action Fairness 2005*, ditentukan bahwa *coupon settlement* ini sebelum disetujui oleh hakim harus terlebih dahulu diteliti oleh ahli yang independen, untuk memastikan bahwa kesepakatan

perdamaian yang akan dilakukan tidak merugikan anggota kelas.

3. Penyelesaian sengketa melalui *class action* dirasa tidak adil bagi anggota kelompok yang tidak mengetahui adanya gugatan perwakilan. Ketidakadilan ini dapat muncul dalam prosedur *class action*, yang berkaitan dengan masalah penentuan keanggotaan kelompok beserta daya ikat dari putusan hakim. Apabila prosedur yang dipilih untuk menentukan keanggotaan kelompok dalam *class action* adalah *opt in*, maka tidak adanya secara aktif pernyataan untuk masuk sebagai anggota kelompok dari anggota-anggota kelompok yang sebenarnya yang mempunyai kesamaan kepentingan, hanya karena mereka tidak mengetahui adanya gugatan kelompok yang sedang digelar, mengakibatkan hilangnya hak mereka untuk meneikmati keberhasilan gugatan *class action*, karena putusan hakim hanya mempunyai akibat hukum bagi mereka yang masuk sebagai anggota kelompok.

Sebaliknya jika prosedur yang dipilih untuk menentukan keanggotaan kelompok adalah prosedur *opt-out*, maka tidak adanya pernyataan *opt-out* dari orang yang potensial menjadi anggota kelompok, hanya karena mereka tidak mengetahui, akan mengakibatkan dimasukkan mereka menjadi anggota kelompok dengan segala konsekuensinya. konsekuensi hukum

mereka terkait dengan putusan hakim yang dijatuhkan, terlepas apakah putusan tersebut menyatakan gugatan dimenangkan atau dikalahkan. Apabila putusan hakim menyatakan gugatan ganti rugi dikabulkan, itu pun tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin dituntut, karena ganti rugi yang diterima tidak sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya yang dapat diterima jika gugatan diajukan secara individual.

Apabila putusan hakim menyatakan bahwa gugatan ditolak, maka bagi mereka yang sama sekali tidak mengetahui adanya gugatan dan tidak menyatakan keluar dari keanggotaan, terpaksa ikut menanggung, dan ini tentu saja tidak merugikan kepentingannya. *Class action* dirasakan sebagai mengeompromikan kesempatan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi, sehingga mengubah pemikiran tradisional mengenai keadilan individu. Untuk mengatasi ketidakadilan dalam menggunakan prosedur *opt-in* maupun *opt-out*, maka ada dua hal yang harus dipikirkan.

- Pertama, tentang cara pemberitahuan yang tepat, agar setiap orang yang potensial menjadi anggota kelompok dapat mengetahui adanya gugatan dengan cara yang mudah dan tepat.
- Kedua, harus ada cara yang sederhana dan memberi kesepakatan atau waktu yang cukup layak bagi orang-orang

yang potensial untuk menjadi anggota kelompok, untuk mempertimbangkan akan menerima atau menyerahkan pernyataan keberatannya atas gugatan *class action* yang diajukan.

4. Kesulitan untuk mengelola. Semakin banyak jumlah anggota kelompok, semakin sulit mengelola gugatan *class action*, lebih-lebih *class action* yang melibatkan puluhan ribu anggota. Kesulitan ini dapat terjadi pada tahap pemberitahuan dan pendistribusian ganti kerugian. Semakin besar jumlah anggota kelompok dan semakin menyebar domisili mereka, semakin sulit menentukan cara pemberitahuan yang paling tepat, dan batas waktu untuk memberi kesempatan membuat pernyataan *opt-in* atau *opt-out*, serta semakin besar biaya pemberitahuan yang harus dikeluarkan. Seringkali keseluruhan jumlah ganti kerugian yang harus diberikan kepada seluruh anggota kelompok tidak sebanding dengan biaya pendistribusiannya.
5. Jumlah tuntutan ganti kerugian pada gugatan *class action* dapat mengakibatkan tergugat bangkrut, apabila gugatannya dikabulkan, tergugat tidak hanya wajib memberi ganti kerugian atau melakukan tindakan tertentu terhadap pihak-pihak yang dirugikan, yang disebut dalam surat gugatan saja, sebagaimana yang terjadi dalam gugatan *joinder*, akan tetapi juga kepada anggota lainnya yang jumlahnya mungkin tidak

akan dapat diperkirakan sebelumnya oleh tergugat, lebih-lebih apabila gugatan ditujukan pada perusahaan dengan aset yang kecil.

6. Publikasi tentang diajukannya gugatan *class action* yang melibatkan orang banyak dengan jumlah ganti kerugian yang demikian besar umumnya lebih menarik untuk diangkat sebagai konsumsi berita oleh media massa. lebih-lebih apabila pengajuan gugatan *class action* ini ada kemungkinan mempunyai muatan politis, kedudukan atau kekuasaan tergugat. Biasanya para pembaca media masa kemudian mempunyai prasangka yang tidak baik terhadap tergugat.⁴⁶

Menurut ibu Fifiyanti, PERMA No.1 Tahun 2002 tentang gugatan perwakilan kelompok masih memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya ialah PERMA tersebut tidak menentukan batas minimal anggota kelompok dalam mengajukan gugatan perwakilan kelompok,⁴⁷ sedangkan menurut bapak Ibrahim Paleno, menyatakan, selain memiliki banyak kelebihan, gugatan *class action* juga memiliki kekurangan-kekurangan, yaitu karena menggugat orang banyak, maka tidak menutup kemungkinan adanya benturan kepentingan diantara satu kelompok dan mengidentifikasi data anggota kelompok yang cukup banyak tentu tidak mudah yang akan berimbang pada pendistribusian ganti rugi kepada

⁴⁶ibid, Hal. 33.

⁴⁷Wawancara dengan ibu Fifiyanti S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Rabu, 20 November 2013, Pengadilan Negeri Sungguminasa.

anggota kelompok.⁴⁸ Dari uraian beberapa hakim dapat kita simpulkan bahwa masih banyak hal yang tidak diatur sedemikian rupa oleh PERMA No.1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok.

⁴⁸Wawancara dengan bapak Ibrahim Paleno S.H,M.H-Hakim Pengadilan Negeri Makassar, 18 November 2013, Pengadilan Negeri Makassar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat membuat beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Belum terdapat cara merealisasikan atau membagi ganti kerugian kepada anggota-anggota kelompok yang berjumlah banyak, yang berada di wilayah hukum pengadilan yang berbeda, jika gugatan suatu kelompok dikabulkan. Selain itu belum terdapat cara agar suatu kelompok yang berada di wilayah hukum pengadilan yang berbeda dapat membuktikan keikutsertaannya dalam suatu kelompok yang mengajukan gugatan *class action* agar berhak memperoleh ganti rugi. Selain itu dalam praktiknya anggota kelompok sering kali mendapatkan ganti rugi yang jumlahnya sangat kecil. Anggota kelompok juga sering tidak mengetahui mengenai pemberitahuan jika telah terjadi perdamaian (*class settlement*). Hal ini disebabkan mekanisme pemberitahuan/pengumuman dan mekanisme pendistribusian ganti kerugian terkadang sangat tidak efektif. Mekanisme *opt-in* ataupun *opt-out* sebagai pilihan mekanisme keikutsertaan seseorang/ suatu kelompok dalam gugatan class action juga dirasa belum memberikan nilai-nilai keadilan, sebab

masih memiliki kekurangan yang bersifat tidak adil. Penulis mengharapkan adanya mekanisme yang lebih adil dalam hal keikutsertaan sebagai anggota gugatan *class action*. Kemudian secara normatif dalam PERMA No.1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok belum diatur mengenai batas minimal jumlah suatu kelompok agar dapat diajukan gugatan *class action*, adanya batas minimal ini sangat perlu guna efektifitas dan efisiensi pelaksanaan gugatan *class action*.

2. Adapun perihal pembedaan jenis kerugian dalam perkara gugatan *class action* penulis menarik kesimpulan bahwa kerugian dibedakan berdasarkan jenis anggota kelompok yang tergabung dalam gugatan *class action*. Setiap kelompok yang berbeda-beda tentu memiliki kerugian yang berbeda berdasarkan kepentingan kelompoknya. Kerugian tersebut kemudian dirangkum dalam kerugian materil dan immateril.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, maka penulis memiliki saran, yaitu:

Revisi terhadap PERMA No.1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok dengan memasukkan pembahasan mengenai mekanisme pendistribusian ganti rugi ke setiap anggota kelompok secara efektif dan efisien, termasuk untuk kelompok yang berada di luar wilayah hukum pengadilan yang menangani perkara tersebut. Kemudian harus ditambahkan pembahasan mengenai mekanisme yang lebih adil dalam

hal keikutsertaan seseorang/kelompok sebagai anggota kelompok dalam gugatan *class action*. Terakhir perlu adanya batasan minimal yang jelas mengenai jumlah kelompok yang diwakili dalam suatu gugatan *class action*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdoel Djamali R.S, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Jakarta Pers.

Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Bagir Manan, 2007, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Yogyakarta: FH UII press

Indro Sugianto, 2013, *Class Action Konsep dan Strategi Gugatan Kelompok untuk Membuka Akses Keadilan Bagi Rakyat*, Malang: Setara Press.

M. Yahya Harahap, 2013, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.

_____, 2006, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika

Nurnaningsih Amriani, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers.

Ridwan Syahrani, 2000, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Aditya Bakti.

Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sukarno Aburaera, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Makassar: Arus Timur

Sugianto, S.H, M.H., 2013, *Class Action Konsep dan Strategi Gugatan Kelompok untuk Membuka Akses Keadilan Bagi Rakyat*, Malang: Setara Pers.

Susanti Adi Nugroho, S.H.,M.H., 2010, *Class Action & Perbandingannya Dengan Negara Lain*, Jakarta: Kencana.

JURNAL DAN SUMBER LAINNYA

Emerson Yuntho, dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005, *Class Action Sebuah Pengantar*, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X.

M. Tjoanda, 2010, Wujud Ganti rugi Menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4

Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, BAB II Tata Cara dan Persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok

Putusan Perkara Nomor : 33/PDT.G/2011/PN.Kdr

Putusan Perkara Nomor: 2975/K/Pdt/2009/PN.Jkt

WEBSITES

Hukum Acara Perdata, *Jenis-jenis Gugatan Perkara Yang Lazim Diajukan di Peradilan Umum*,
<http://www.hukumacaraperdata.com/2012/05/14/jenis-jenis-gugatan-perkara-perdata-yang-lazim-diajukan-di-peradilan-umum/>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2013

Hukum Perdata, *pengertian dan ruang lingkupnya*,
<http://ayobelajarhukum.blogspot.com/2011/11/hukum-perdata.html>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2013

Law File, *Pengertian Hukum Acara Perdata*
<http://lawfile.blogspot.com/2011/05/pengertian-hukum-acara-perdata.html>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2013

Gugatan Class Action, <http://www.inclaw-hukum.com/index.php/hukum-perdata/hukum-acara-perdata/139-gugatan-class-action>, Diakses pada tanggal 29 September 2013

Hukum Acara Perdata, *Penggabungan Gugatan*,
<http://www.hukumacaraperdata.com/2012/08/14/penggabungan-gugatan/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2014